

Di tempat yang sama, wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat tidak dalam posisi mendukung dua usulan mekanisme Pilkada, baik langsung atau melalui DPRD. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengusulkan jalan tengah untuk mempertemukan dua usulan yang berbeda, jalan tengah itu adalah pemilihan langsung untuk bupati/wali kota, sementara gubernur dipilih oleh DPRD.

Ia berharap perbedaan pandangan itu dapat disepakati melalui musyawarah mufakat. Pengambilan suara (voting) dilakukan sebagai langkah terakhir.

Wakil ketua DPRD dari fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, proses komunikasi dengan partai di DPR terkait RUU Pilkada terus intensif dilakukan. " Saya mengakini tanggal 25 September harapan rakyat terhadap kedaulatan yang mereka miliki akan tetap bisa digunakan di pilkada," katanya.

Dengan posisi Partai Demokrat memilih pilkada langsung, peta dukungan di DPR memang berubah. Jika semua konsisten, pilkada langsung didukung 287 suara, sementara pilkada oleh DPRD didukung 273 suara. Karena hitung ini. Anggota pansus RUU Pilkada dari fraksi PKB Abdul Malik Haramain, yakin pilkada langsung akan menang jika voting dilakukan soal pilkada langsung atau oleh DPRD.

Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan, perbedaan RUU Pilkada terletak pada pilkada langsung atau oleh DPRD. " Ya itu memang kemungkinan akan di voting," ujarnya.

Diferensiasi : *Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis.” Upaya itu nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan,” katanya.*

Dalam kalimat Indiferensiasi jelas dikatakan bahwa sekelompok Elite yang mencoba merebut kedaulatan dari tangan Rakyat dan seringkali menyalah gunakan kekuasaan. Lalu di dalam kalimat yang kedua yaitu kalimat Diferensiasi menjelaskan bahwa Megawati dan umumnya PDI-P mengajak untuk menanggapi secara kritis tentang perubahan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.

Teks ini memarjinalkan posisi Kelompok Elite dengan menampilkan seakan kaum elite itu haus kekuasaan dengan merebut kedaulatan dari tangan rakyat lalu kaum Elite juga digambarkan sering menyalahgunakan kekuasaan dengan cara korupsi dan melanggengkan nepotisme.

Disisi lain ditampilkan juga Megawati sebagai ketua Umum PDI-P sangat memikirkan nasib rakyat dengan cara menanggapi dan memberi respon secara kritis mengenai polemic tersebut. Hal ini menunjukkan seolah-olah PDI-P peduli terhadap masalah rakyat. Teks tersebut sangat memarjinalkan Kaum Elite karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi yang pertama (Kaum Elite yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencoba merebut kedaulatan dari tangan Rakyat) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (Megawati yang mengajak menanggapi dengan kritis polemic ini). Fakta seperti kenapa mereka (kaum Elite) menyalahgunakan kekuasaan dan mencoba mengubah pilkada langsung ke DPRD tidak ditampilkan.

Strategi wacana seperti ini juga ada lagi yaitu terdapat pada paragraf ke 5 yaitu:

Pilkada langsung karena berdasarkan amanat reformasi. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap PDI-P dengan sikap atau kepemimpinan pada masa Orde Baru yang dikuasai oleh segelintir Elite dan yang sarat akan nepotisme. Dan ini mengandung konstruksi pencitraan karena PDI-P sekarang beralih menjadi partai pemerintahan.

Ada unsur memarjinalkan posisi kaum elite jika kita telaah lebih dalam, yaitu dengan cara membandingkan masa Orde Baru berkuasa yang mana ketika itu Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) yang berasal dari partai yang berkuasa, hal ini menunjukkan bahwa kaum elite suka memonopoli kekuasaan. Dan disisi lain ditampilkan sosok Megawati sebagai ketua umum PDI-P sangat mendukung dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan amanat reformasi. Dan ini mengindikasikan bahwa partai moncong putih menghormati kedaulatan dan hak politik Rakyat sepenuhnya.

Dikatakan memarjinalkan karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi yang pertama (ciri dari kepemimpinan pada masa Orde Baru yang suka melanggengkan kekuasaan dengan pemilihan pemimpin oleh segelintir Elite) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua(Megawati sangat mendukung pemilihan Umum secara langsung karena itu merupakan amanat dari reformasi dan merupakan wujud dari demokrasi dan hak politik rakyat. Dan ada yang aneh fakta mengapa masa kepemimpinan Orde Baru bisa begitu dan apa yang diinginkan oleh Megawati selaku ketua umum PDI-P tidak ditampilkan dalam wacana tersebut.

2. Objektivasi- Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai sesuatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkrit, ataukah ditampilkan

Soekarnoputri, program yang telah dipaparkan presiden terpilih Jokowi, dan pandangan umum DPD-DPD yang disampaikan Ketua DPD Jawa Tengah Heru Sudjarmoko.

Terkait sikap politik menurut Puan, Rakernas IV PDI-P mendukung visi dan misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 2014-2019. Pemerintah Jokowi- JK diharapkan secepatnya mengatasi masalah krisis pangan dan energi yang mengancam kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Puan, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain.

Sebelumnya, permasalahan kedaulatan pangan menjadi pembahasan dinamis di siding Komisi I Rakernas, yang juga diikuti 28 kader PDI-P yang menjadi Kepala Daerah. Beberapa Kepala Daerah siap menyediakan ribuan hektar lahan padi, tebu, serta komoditas pertanian lain. Selain soal lahan, pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan dan sarana irigasi juga dibahas.

Pemerintah baru juga diharapkan mengatasi krisis ekonomi dan energi yang berpotensi terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas, serta pembekakan deficit transaksi berjalan, melemahnya nilai rupiah, utang luar negeri yang besar, dan ketergantungan terhadap produk pangan impor. Dalam catatan Kompas, Jokowi berniat mengurangi subsidi BBM secara bertahap.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies Erwin Usman, dalam diskusi Migas untuk Rakyat”, Minggu (21/9), mengatakan , persoalan kedaulatan energi dan gangguan dari mafia migas di sektor hulu dan hilir itu tidak mengada-ada.

berkeinginan untuk mengatasi krisis pangan dan energi yang sedikit banyak diakibatkan oleh ulah Mafia Migas . Teks tersebut sangat memarjinalkan Kelompok Mafia Migas karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi yang pertama (Gangguan Mafia Migas di hulu-hilir yang tidak mengada-ada) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (Atasi Krisis pangan dan energi). Fakta seperti kenapa mereka (kelompok Mafia Migas) mengacau dan mengaggu tidak ditampilkan.

Strategi wacana seperti ini juga ada lagi yaitu terdapat pada paragraf ke 6 yaitu:

“Berkaitan dengan hal itu, lanjut Puan, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain.”

Indiferensiasi : *politik pangan dan energi pemerintah dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain.*

Diferensiasi :. *Berkaitan dengan hal itu, lanjut Puan, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain.*

Dalam kalimat yang pertama(Indiferensiasi) jelas dikatakan bahwa adanya politik dan kebijakan dari pemerintahan yang sebelumnya yaitu kebijakan politik pangan dan energi yang sangat menguntungkan pihak lain yang dalam hal ini adalah Mafia Migas , sedangkan dalam kalimat kedua (Deferensiasi) memaparkan bahwa pemerintahan yang baru akan melakukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain. Kalimat ini secara tidak langsung

Dalam *Inclusion* dibahas bagaimanakah masing-masing kelompok atau aktor ditampilkan dalam suatu pemberitaan. Berikut adalah fakta yang ditemukan dalam teks berita satu (jangan rebut hak rakyat) dan teks berita dua (atasi krisis pangan dan energi) dalam berita harian Kompas edisi 20 – 22 Semtember 2014.

1. Diferensiasi- Indiferensiasi

Suatu peristiwa atau seorang actor social bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau actor lain dalam teks. Hadirnya(*inclusion*) peristiwa atau kelompok lain selain yang di beritakan itu, menurut Van leeuwen, bisa jadi penanda yang baik bagaimana suatu kelompok atau peristiwa direpresentasikan dalam teks. Penghadiran kelompok atau peristiwa lain itu secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok itu tidak bagus dibandingkan dengan kelompok lain. Ini merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih bagus.

Diferensiasi ini dalam wujudnya yang lain, sering kali menimbulkan prasangka tertentu. Terutama dengan membuat garis batas antara pihak “ kita” dengan pihak “mereka”. Kita baik sementara mereka buruk. Menurut Van leeuwen, penggambaran kita dan mereka adalah strategi wacana tertentu untuk menampilkan kenyataan bagaimana lewat strategi wacana tertentu satu kelompok dikucilkan, dimarjinalkan, dan dianggap buruk.

Dalam berita satu (jangan rebut hak rakyat) kelompok yang dimarjinalkan adalah kelompok elite dan pemimpin Orde Baru yang dianggap sering menyalahgunakan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan nya. Dan perilaku ini berbeda dengan pemerintahan sekarang yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia PDI – P yang peduli terhadap rakyat.

Sedangkan dalam berita dua (atasi krisis pangan dan energi) disini kelompok yang dimarjinalkan adalah kelompok Mafia Migas yang diangkap selalu melakukan gangguan terhadap produksi energi dalam negeri yang dalam hal ini dapat mengganggu kedaulatan energi nasional. Berbeda dengan pemerintah saat ini yang berkomitmen untuk mengatasi masalah energi dan pangan dan ingin mengatur ulang tentang politik pangan dan energi.

2. Objektivasi- Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau actor sosial ditampilkan dengan memberikan petunjuk yang konkrit ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Makna yang diterima khalayak akan berbeda karena dengan membuat abstraksi, peristiwa atau actor yang sebenarnya secara kuantitatif berjumlah kecil dengan abstraksi dikomunikasikan seakan berjumlah banyak.

Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi. Penyebutan dalam bentuk abstraksi ini, menurut Van leeuwen sering kali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan mengenai informasi yang pasti, tetapi sering kali lebih sebagai strategi wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu.

Berita satu (jangan rebut hak rakyat) : Abstraksi yang terlihat membuat sesuatu kata yang abstrak seperti kata “ berbagai”. Dengan menggunakan strategi kata tersebut khalayak atau pembaca akan akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi

Berita dua (atasi krisis pangan dan energi) : Abstraksi yang terlihat membuat sesuatu kata yang abstrak seperti kata “ *Tidak Mengada – ada* ”. Dengan menggunakan strategi kata tersebut khalayak atau pembaca akan akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi.

3. Nominasi-Kategorisasi

Dalam suatu pemberitaan mengenai actor(seseorang/ kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah actor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari actor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori ini sebenarnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Kategori apa yang ingin ditonjolkan dalam pemberitaan, menurut Van Leeuwen, sering kali menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam ideologi dari media yang bersangkutan. Karena kategori ini menunjukkan representasi bahwa suatu tindakan tertentu atau kegiatan tertentu menjadi ciri khas atau atribut yang selalu hadir sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Seringkali penambahan kategori ini tidak menambah pengertian atau informasi apa pun. Peneliti harus kritis melihat bagaimana suatu kelompok dimarginalkan atau dikucilkan dengan memberikan kategori atau label yang buruk.

Berita satu (jangan rebut hak rakyat) : pemberian kategori yang represif dan melanggengkan kekuasaan pada era pemerintahan Orde Baru kekuasaan itu secara tidak langsung berita tersebut mengasosiasikan ke dalam benak khalayak atau masyarakat bahwa kepemimpinan Orde Baru itu identik dengan nepotisme, otoriter dan gemar melanggengkan kekuasaan. Ada unsur menyudutkan dan memberi kesan buruk pada pemimpin Orde Baru.

Berita dua (atasi krisis pangan dan energi) :Pemberian kategori “ *Politisi*” mengindikasikan bahwa kasus mengenai gangguan Mafia Migas ini ada unsur politik didalamnya, terbukti yang menjadi korban adalah seorang politisi. Hal ini menunjukkan bahwa

